

Redistribusi Tanah Bagian dari Pengakuan Hak Petani

Penulis: Nur Aivanni

Pada: Minggu, 09 Des 2018, 22:07 WIB [Ekonomi](#)

<http://mediaindonesia.com/read/detail/203110-redistribusi-tanah-bagian-dari-pengakuan-hak-petani>



Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih -- MI/ADAM DWI

KETUA Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan bahwa hak-hak petani harus terus diperhatikan oleh pemerintah. Program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait redistribusi tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dikatakannya, adalah bentuk dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak petani.

"Jadi mendistribusikan hak terhadap tanah petani, itu bagian dari pengakuan terhadap hak-hak petani," kata Henry saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (9/12).

Baca juga: [Jokowi Akan Buka Rakernas Asparindo 2018](#)

Hanya saja redistribusi tanah melalui TORA, dikatakan Henry, masih terbilang kecil. "Baru puluhan ribu, cuma sudah direncanakan akan dibagikan sebanyak 1 juta hektare yang akan dimulai awal Januari 2019," ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintahan Jokowi-JK memiliki empat program yang berkaitan dengan pertanahan. Pertama, redistribusi tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,5 juta hektare. Kedua, legalisasi tanah 4,5 juta hektare. Ketiga,

redistribusi tanah 12,7 juta hektare melalui program perhutanan sosial. Keempat, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sertifikasi tanah.

Untuk program PTSL sendiri, Henry mengatakan pada tahun 2017 sudah dibagikan 5,4 juta bidang tanah. Tahun ini sebanyak 7 juta bidang tanah. Dan untuk tahun 2019, kata Henry, direncanakan akan dibagikan 9 juta bidang tanah.

"Manfaat pembagian sertifikasi tanah, bagi petani cukup jelas dimana batas-batas tanahnya, bisa menghindari konflik-konflik pertanahan," pungkasnya. (OL-6)

Reformasi Agraria,

Komnas HAM Minta Pemerintah Tak Fokus Hanya Soal Sertifikat

Penulis: **Satria Sakti Utama**

Pada: Minggu, 09 Des 2018, 22:05 WIB **EKONOMI**



Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik -- MI/ PERMANA

PEMERINTAH fokus menggenjot penyaluran sertifikat tanah kepada masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat yang dibebankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Langkah ini mendapatkan apresiasi khusus dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. Namun, Ahmad menilai pemerintah harus membagi fokus untuk merampungkan program-program reformasi agraria yang lain, semisal program distribusi lahan dan perhutanan sosial.

"Ada kebijakan-kebijakan penyelesaian kasus agraria yang kita apresiasi. Tapi yang lebih mendasar itu distribusi lahan seperti yang dijanjikan pak Jokowi tempo hari. Termasuk perhutanan sosial yang targetnya 12,7 juta hektar. Ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum punya lahan agar produktif. Ini yang belum optimal," jelasnya saat dihubungi Minggu (9/12) malam.

Baca juga: [Reforma Agraria Persoalan Jangka Panjang](#)

Ahmad berharap, diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan baik. Perpres ini juga mendapatkan apresiasi dari Komnas HAM karena subyek penerima program ini menyasar masyarakat menengah ke bawah.

"Perpres yang dikeluarkan bulan September itu sangat bagus. Saya harapkan Perpres itu dapat mempercepat program reformasi agraria. Tapi kita masih melihat ada kelemahan soal mekanisme dan kelembagaannya," tambah Ahmad. (OL-6)